

Evaluasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Kasus: Kelurahan Sarudik)

Fany Tri Chantika Sinaga², Simson Ginting³

¹² Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: *fanysinaga134@gmail.com¹, simson.ginting@usu.ac.id²*

Abstract

The Fishermen Insurance Premium Assistance Program (BPAN) is a government policy aimed at providing social protection for fishermen who face high risks in fishing activities. However, the effectiveness of program implementation at the local level still encounters several challenges, including limited access to information, administrative barriers, and low sustainability of participation. This study aims to evaluate the implementation of the BPAN Program in Central Tapanuli Regency using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model developed by Stufflebeam. This study employed a descriptive qualitative approach. The research was conducted at the Department of Marine Affairs and Fisheries of Central Tapanuli Regency and Sarudik Village. The informants were selected through purposive sampling, consisting of 11 participants from local government officials, fishermen group representatives, and beneficiary fishermen. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. Data analysis was carried out using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, involving data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that BPAN has high relevance to the protection needs of fishermen. In the context dimension, the program is aligned with community needs; however, socialization activities have not fully reached all target groups. In the input dimension, program resources and implementation mechanisms are available, but challenges remain regarding beneficiary quotas and fishermen's administrative readiness. In the process dimension, implementation has followed established procedures, although bureaucratic barriers and service delays persist. In the product dimension, the program provides benefits in the form of increased security and financial protection, but continued participation after the subsidy period remains low. The BPAN Program in Central Tapanuli Regency has been implemented and provides tangible benefits; however, it has not yet achieved optimal effectiveness. Strengthening public communication, simplifying administrative procedures, improving inter-institutional coordination, and developing sustainable financing strategies are required to ensure the continuity of social protection for fishermen.

Keywords: *Program Evaluation, BPAN, Fishermen Insurance, CIPP Model, Social Protection*

Abstrak

Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada nelayan yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam aktivitas penangkapan ikan. Namun, efektivitas implementasi program di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses informasi, kendala administrasi, dan keberlanjutan kepesertaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program BPAN di Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP) Stufflebeam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kelurahan Sarudik. Informan dipilih melalui purposive sampling yang terdiri atas 11 orang, yaitu unsur pemerintah daerah, pengurus kelompok nelayan, dan nelayan penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPAN memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan perlindungan nelayan. Pada aspek context, program telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi sosialisasi belum menjangkau seluruh kelompok sasaran. Pada aspek

input, sumber daya dan mekanisme program telah tersedia, namun masih terdapat kendala kuota penerima dan kesiapan administrasi nelayan. Pada aspek process, pelaksanaan telah mengikuti prosedur, tetapi masih ditemukan hambatan birokrasi dan keterlambatan pelayanan. Pada aspek product, program memberikan manfaat berupa rasa aman dan perlindungan finansial, tetapi keberlanjutan kepesertaan setelah subsidi berakhir masih rendah. Program BPAN di Kabupaten Tapanuli Tengah telah berjalan dan memberikan manfaat nyata, tetapi belum optimal. Penguatan sosialisasi, penyederhanaan administrasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta strategi keberlanjutan pembiayaan diperlukan agar perlindungan sosial bagi nelayan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi Program, BPAN, Asuransi Nelayan, Model CIPP, Perlindungan Sosial

Pendahuluan

Program asuransi bagi nelayan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang setiap hari menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan di laut. Risiko tersebut meliputi kecelakaan kerja, cacat tetap, hingga meninggal dunia yang dapat mengancam keberlanjutan mata pencaharian serta kesejahteraan keluarga nelayan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menghadirkan sistem perlindungan sosial yang mampu meminimalkan dampak ekonomi akibat risiko tersebut. Salah satu bentuk perlindungan yang dikembangkan pemerintah adalah Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), yaitu program bantuan pembayaran premi asuransi yang ditujukan bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan selama menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) telah dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2017 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam¹. Program ini bertujuan memberikan perlindungan kepada nelayan terhadap berbagai risiko yang dihadapi selama menjalankan aktivitas penangkapan ikan di laut.

Asuransi nelayan merupakan mekanisme perlindungan yang memberikan santunan atau ganti rugi apabila nelayan mengalami risiko yang dijamin, seperti kecelakaan kerja, cacat tetap, maupun meninggal dunia akibat aktivitas melaut. Kehadiran program ini diharapkan mampu mengurangi dampak ekonomi akibat tingginya risiko profesi nelayan sehingga dapat menjaga keberlangsungan mata pencaharian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir². Sebagai bentuk penguatan pelaksanaan program tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa Program BPAN tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko pekerjaan nelayan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berasuransi, mendorong keberlanjutan kepesertaan secara mandiri setelah bantuan pemerintah berakhir, memberikan santunan kepada ahli waris, serta mengalihkan risiko ekonomi nelayan kepada perusahaan asuransi. Sasaran program ini adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan cakupan perlindungan berupa santunan kematian, cacat tetap, serta biaya pengobatan akibat kecelakaan yang berkaitan dengan aktivitas perikanan. Meskipun demikian, implementasi

¹ Theta Murty, "Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan," *Simbur Cahaya*, no. 18 (2020): 158–75, <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1043>.

² Ryanty Aprilia, Debora Selly Hutabarat, and Putri Cristin, "Transformasi Mata Pencaharian Generasi Muda Dalam Komunitas Nelayan Di Bintan," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4, no. 02 SE-Artikel (June 2, 2026), <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i02.2268>.

Program BPAN di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menunjukkan berbagai persoalan.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, jumlah peserta BPAN selama periode 2017–2023 mencapai 7.531 orang, sedangkan jumlah nelayan yang mengajukan klaim hanya sebanyak 57 orang. Data tersebut menunjukkan tiga fenomena penting. Pertama, tingkat ketergantungan terhadap subsidi pemerintah masih sangat tinggi karena peserta yang melanjutkan asuransi secara mandiri hanya berjumlah 637 orang atau sekitar 8,45% dari keseluruhan peserta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tujuan Program BPAN untuk membangun kemandirian nelayan dalam memiliki perlindungan asuransi belum sepenuhnya tercapai. Kedua, jumlah peserta Program BPAN mengalami fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan keberlanjutan program (program sustainability) yang diduga dipengaruhi oleh keterbatasan kuota bantuan pemerintah, perubahan kebijakan anggaran, maupun kendala administratif dalam proses pelaksanaan. Ketiga, rasio klaim asuransi yang hanya sekitar 0,75% dari total peserta menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemanfaatan program.

Rendahnya angka klaim tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat kecelakaan kerja nelayan, tetapi juga dapat mengindikasikan adanya hambatan struktural berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur klaim, rendahnya literasi asuransi, ataupun birokrasi pengajuan klaim yang relatif rumit. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Mei 2024. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang nelayan, diperoleh informasi bahwa sebagian masyarakat bahkan belum mengetahui keberadaan Program BPAN maupun manfaat perlindungan yang diberikan. Salah seorang nelayan menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dan menganggap program tersebut tidak penting karena belum memahami manfaatnya. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa tidak semua nelayan memperoleh jaminan perlindungan melalui program tersebut. Sebagian nelayan bahkan tidak mengetahui bahwa pemerintah menyediakan bantuan premi asuransi selama satu tahun, sementara sebagian peserta lainnya belum memahami secara utuh hak, manfaat, maupun mekanisme klaim asuransi yang dimiliki. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan

Program BPAN tidak cukup diukur dari banyaknya jumlah kartu asuransi yang diterbitkan, tetapi juga harus dilihat dari tingkat pemahaman, pemanfaatan, serta keberlanjutan kepesertaan masyarakat nelayan. Fenomena tersebut sejalan dengan berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Penelitian³ di Kabupaten Sibolga menunjukkan bahwa rendahnya keberlanjutan kepesertaan asuransi mandiri disebabkan oleh lemahnya sosialisasi, proses administrasi yang kurang efektif, serta belum optimalnya edukasi mengenai manfaat asuransi kepada nelayan. Oleh karena itu, penelitian tersebut merekomendasikan penguatan kelembagaan nelayan dan peningkatan edukasi sebagai strategi untuk meningkatkan keberlanjutan program. Selanjutnya, penelitian⁴ di Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan mengkaji implementasi Program BPAN menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi

³ Nur Aisyah, Muhammad Syukri Albani Nasution, and Ahmad Muhaisin B Syarbaini Tanjung, "Analisis Partisipasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya Di Kota Sibolga," *Jurnal Lentera Bisnis* 13, no. 3 (2024): 1686–98, <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1213>.

⁴ Irlina Dewi, Titin Sumarni, and Indra Indra, "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan," *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 118–27, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.508>.

pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada proses implementasi kebijakan sehingga belum mengevaluasi sejauh mana program berhasil mencapai tujuan akhirnya dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, penelitian⁵ di wilayah barat Provinsi Jawa Barat di barat provinsi Bandung lebih berfokus pada persepsi nelayan terhadap Program BPAN. Penelitian tersebut menemukan bahwa nelayan pada umumnya memiliki persepsi yang baik terhadap manfaat program, tetapi belum menghubungkan persepsi tersebut dengan efektivitas pelaksanaan, keberlanjutan kepesertaan, maupun pencapaian tujuan Program BPAN setelah bantuan premi pemerintah berakhir.

Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan aspek strategi pengembangan, implementasi kebijakan, dan persepsi masyarakat terhadap Program BPAN. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena masing-masing hanya memotret satu dimensi tertentu dari Program BPAN. Belum terdapat penelitian yang mengevaluasi secara komprehensif keberhasilan Program BPAN berdasarkan indikator evaluasi kebijakan publik sekaligus mengaitkannya dengan kondisi empiris pelaksanaan program di daerah. Kesenjangan penelitian (research gap) tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi pelaksanaan Program BPAN di Kabupaten Tapanuli Tengah. Berbagai fenomena empiris berupa tingginya ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, fluktuasi jumlah peserta, rendahnya rasio klaim asuransi, serta masih rendahnya tingkat pengetahuan nelayan mengenai keberadaan dan manfaat Program BPAN menunjukkan bahwa keberhasilan program belum dapat dinilai hanya dari jumlah penerima bantuan.

Program perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan telah tercapai serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal. Evaluasi program merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan menilai tingkat keberhasilan suatu program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya berfungsi mengukur capaian program, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala, kelemahan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan sehingga dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pada masa mendatang⁶. Dalam konteks Program BPAN, evaluasi menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program mampu memberikan perlindungan kepada nelayan, meningkatkan kesadaran berasuransi, serta mendorong keberlanjutan kepesertaan secara mandiri.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada strategi, implementasi, maupun persepsi nelayan, penelitian ini mengevaluasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) secara komprehensif menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness). Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan Program BPAN di Kabupaten Tapanuli Tengah belum berjalan secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan publik William N. Dunn sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan program, berbagai kendala

⁵ Dida Daniarsyah, "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu," *Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studies (Jipags)* 3, no. NO DATE (2019): 628–43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v3i2.7552>.

⁶ (Joko Pramono., 2020)

implementasi yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan kebijakan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam⁷. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan praktik para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi BPAN⁸.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah serta Kelurahan Sarudik (Lingkungan I, II, dan III), sebagai lokasi utama pelaksanaan program. Informan dipilih melalui purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program⁹. Sebanyak sebelas informan diwawancarai, terdiri atas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dua pegawai bidang perikanan tangkap, dua pengurus kelompok nelayan (HNSI), dan lima nelayan penerima manfaat. Jumlah informan ditetapkan berdasarkan prinsip data saturation, yaitu ketika wawancara tidak lagi menghasilkan tema atau informasi baru¹⁰. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi program.

Analisis data mengikuti model interaktif¹¹ yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara iteratif sepanjang proses penelitian. Seluruh data dianalisis dengan mengelompokkannya ke dalam empat dimensi evaluasi CIPP, yaitu context, input, process, dan product¹². Keabsahan temuan dijamin melalui triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan member checking kepada beberapa informan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi dengan pengalaman mereka sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

A. Efektivitas Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Berdasarkan Model Context, Input, Process, Product (CIPP)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial bagi nelayan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko kecelakaan kerja, cacat tetap, maupun kematian saat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Program ini

⁷ Daniel L Stufflebeam, "The CIPP Model for Program Evaluation BT - Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation," ed. George F Madaus, Michael S Scriven, and Daniel L Stufflebeam (Dordrecht: Springer Netherlands, 1983), 117–41, https://doi.org/10.1007/978-94-009-6669-7_7.

⁸ John W. Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (<https://collegepublishing.sagepub.com/products/qualitative-inquiry-and-research-design-4-246896>, 2020).

⁹ M Q Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (SAGE Publications, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=ovAkBQAAQBAJ>.

¹⁰ Emily Weyant, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th Edition," *Journal of Electronic Resources in Medical Libraries* 19, no. 1–2 (2022): 54–55, <https://doi.org/10.1080/15424065.2022.2046231>.

¹¹ M B Miles, A M Huberman, and J Saldana, *Qualitative Data Analysis* (SAGE Publications, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>.

¹² Stufflebeam, "The CIPP Model for Program Evaluation BT - Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation."

memberikan subsidi premi asuransi selama satu tahun sehingga nelayan memperoleh perlindungan tanpa harus menanggung biaya premi pada tahap awal. Temuan ini mengindikasikan bahwa BPAN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai kebijakan afirmatif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penangkapan, Perizinan, dan Pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah memperkuat temuan tersebut. Beliau menjelaskan *"Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk perlindungan bagi nelayan. Selama satu tahun premi dibayarkan oleh pemerintah sehingga nelayan tidak terbebani biaya. Setelah itu kami mendorong agar mereka dapat melanjutkan secara mandiri agar perlindungan tetap berlanjut."* (Wawancara, 2024)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang BPAN sebagai instrumen perlindungan sekaligus upaya membangun kesadaran nelayan mengenai pentingnya kepemilikan asuransi kerja. Ditinjau dari perspektif model evaluasi CIPP (Stufflebeam & Shinkfield, 2007), aspek context menunjukkan bahwa keberadaan BPAN telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Aktivitas penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga perlindungan melalui skema asuransi menjadi kebutuhan yang nyata. Menurut ¹³ evaluasi konteks bertujuan mengidentifikasi kebutuhan serta menilai apakah tujuan program telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang nelayan penerima manfaat yang menyatakan *"Kalau kami melaut memang risikonya besar. Ombak, cuaca buruk, bahkan kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Dengan adanya asuransi ini kami merasa lebih tenang karena keluarga masih mendapat perlindungan apabila terjadi sesuatu."* (Nelayan, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap perlindungan sosial memang dirasakan langsung oleh nelayan sebagai kelompok sasaran program. Pada dimensi input, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan persyaratan administrasi, mekanisme pendaftaran, kriteria penerima, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan asuransi secara jelas. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa masih terdapat nelayan yang belum memiliki Kartu Kusuka maupun Kartu Nelayan sehingga belum dapat mengikuti program.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyampaikan *"Persyaratan sebenarnya tidak sulit, tetapi masih ada nelayan yang belum memiliki Kartu Kusuka atau belum melengkapi dokumen administrasi sehingga belum bisa kami usulkan sebagai peserta BPAN."* (Pegawai DKP, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kesiapan administrasi masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan ¹⁴ yang menyatakan bahwa kualitas pendataan penerima manfaat dan koordinasi antarinstansi merupakan faktor utama keberhasilan program perlindungan nelayan. Penelitian ¹⁵ juga menemukan bahwa rendahnya literasi administrasi menjadi salah satu penyebab terbatasnya akses nelayan terhadap program perlindungan sosial. Pada aspek process, penelitian menemukan bahwa mekanisme pelaksanaan BPAN telah mengikuti prosedur operasional yang ditetapkan, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, penerbitan Surat Keputusan Nelayan Penerima BPAN,

¹³ Stufflebeam.

¹⁴ (Findra Riadi., 2026)

¹⁵ Ahmad Abdul Aziz, "Strategi Peningkatan Kesadaran Dan Akses Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Nelayan Di Kabupaten Indramayu" 1 (2025): 19–28, <https://doi.org/10.31002/rosee.v1i2.2872>.

penerbitan polis, hingga mekanisme klaim asuransi. Seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses sosialisasi masih belum menjangkau seluruh nelayan. Seorang nelayan menyampaikan *"Kami baru mengetahui cara mengurus klaim setelah ada petugas dari dinas yang datang menjelaskan. Sebelumnya kami hanya tahu ada kartu asuransi, tetapi tidak paham bagaimana cara menggunakannya."* (Nelayan, 2024). Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan HNSI menyatakan *"Masih banyak anggota kelompok yang menganggap asuransi tidak penting karena belum pernah mengalami kecelakaan. Akibatnya mereka kurang aktif mengurus kelengkapan administrasi."* (Ketua HNSI, 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kendala utama implementasi bukan terletak pada prosedur program, melainkan pada proses komunikasi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan¹⁶ yang menegaskan bahwa komunikasi kebijakan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi. Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian¹⁷ yang menyatakan bahwa efektivitas program perlindungan nelayan sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi dan komunikasi pemerintah kepada kelompok sasaran.

Pada dimensi product, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPAN telah memberikan manfaat nyata berupa perlindungan finansial ketika nelayan mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Program ini juga meningkatkan rasa aman nelayan saat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Salah seorang nelayan penerima manfaat menyampaikan *"Kami merasa lebih tenang melaut karena kalau terjadi kecelakaan keluarga tidak sepenuhnya menanggung beban ekonomi. Program ini sangat membantu kami."* (Nelayan Penerima BPAN, 2024). Meskipun demikian, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penangkapan menunjukkan adanya tantangan keberlanjutan program. *"Kendala terbesar adalah setelah bantuan premi satu tahun selesai. Sebagian besar nelayan belum melanjutkan kepesertaan secara mandiri karena keterbatasan ekonomi dan masih menganggap asuransi sebagai kebutuhan sekunder."* (Kepala Bidang Penangkapan, 2024)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program masih didominasi pada manfaat jangka pendek. Dalam perspektif evaluasi CIPP, dimensi product tidak hanya menilai hasil langsung, tetapi juga dampak dan keberlanjutan program¹⁸. Oleh karena itu, keberhasilan BPAN belum sepenuhnya optimal apabila kepesertaan nelayan berhenti setelah subsidi pemerintah berakhir. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan laporan¹⁹ yang menjelaskan bahwa program perlindungan sosial bagi nelayan akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan demikian, keberlanjutan perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada subsidi pemerintah, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi dan literasi keuangan nelayan. Secara keseluruhan, evaluasi berdasarkan model CIPP menunjukkan bahwa Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah telah memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat nelayan, didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi penerima program. Namun demikian, efektivitas implementasi masih

¹⁶ Gisela Mburu Amma, Nanang Bagus, and Agung Suprojo, "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sidomulyo Kota Batu Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn," *Lemari: Journal of Social Science* 2, no. 1 (2024): 1–7, <https://doi.org/10.61105/jss.v2i1.96>.

¹⁷ (Findra Riadi., 2026)

¹⁸ Stufflebeam, "The CIPP Model for Program Evaluation BT - Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation."

¹⁹ David Lymer, Jesper Clausen Simon Funge-Smith, and Weimin Miao, *Status and Potential of Fisheries and Aquaculture in Asia and the Pacific 2008, Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific*, 2008, <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0433e/i0433e00.pdf>.

dipengaruhi oleh rendahnya sosialisasi, keterbatasan pemahaman administrasi, dan belum berlanjutnya kepesertaan setelah masa subsidi berakhir. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi komunikasi publik, memperluas pendampingan administrasi kepada nelayan, serta mengembangkan skema keberlanjutan asuransi agar tujuan perlindungan sosial bagi nelayan dapat tercapai secara berkesinambungan.

B. Evaluasi Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Menggunakan Model CIPP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan perlindungan sosial pemerintah yang bertujuan mengurangi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Program ini memberikan bantuan pembayaran premi asuransi selama satu tahun kepada nelayan yang memenuhi persyaratan sehingga mereka memperoleh perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, cacat tetap, maupun kematian. Berdasarkan model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP) yang dikembangkan oleh ²⁰ implementasi BPAN di Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa program telah memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat nelayan, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pada setiap dimensi evaluasi.

Pada dimensi context, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPAN telah menjawab kebutuhan perlindungan sosial masyarakat nelayan yang setiap hari bekerja dalam kondisi berisiko tinggi. Aktivitas melaut sangat dipengaruhi oleh cuaca ekstrem, gelombang tinggi, kecelakaan kerja, maupun risiko kehilangan nyawa sehingga keberadaan jaminan asuransi menjadi kebutuhan yang mendasar. Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan program telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran sebagaimana dikemukakan oleh Stufflebeam dan Shinkfield (2007) bahwa evaluasi konteks bertujuan mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat serta menilai kesesuaian tujuan program dengan permasalahan yang dihadapi. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa sebagian nelayan belum mengetahui keberadaan Program BPAN secara menyeluruh. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penangkapan, Perizinan, dan Pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyatakan *"Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan sebenarnya sudah kami sosialisasikan melalui kelompok nelayan dan HNSI. Namun kami mengakui masih ada nelayan yang belum memperoleh informasi secara utuh karena keterbatasan jangkauan sosialisasi, terutama nelayan yang tidak aktif dalam kelompok."* (Kepala Bidang Penangkapan, Wawancara, 2024).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah seorang nelayan penerima manfaat yang mengungkapkan *"Saya mengetahui adanya asuransi ini bukan dari pemerintah secara langsung, tetapi dari ketua kelompok nelayan. Kalau tidak diberi tahu teman-teman, mungkin saya juga tidak tahu ada bantuan seperti ini."* (Nelayan, Wawancara, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap perlindungan sosial memang tinggi, namun proses komunikasi kebijakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran. Kondisi ini mendukung teori implementasi kebijakan ²¹ yang menempatkan komunikasi sebagai salah satu variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan ²² yang

²⁰ Stufflebeam, "The CIPP Model for Program Evaluation BT - Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation."

²¹ Amma, Bagus, and Suprojo, "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sidomulyo Kota Batu Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn."

²² Lymer, Simon Funge-Smith, and Miao, *Status and Potential of Fisheries and Aquaculture in Asia and the Pacific 2008*.

menjelaskan bahwa efektivitas program perlindungan sosial sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat pesisir.

Pada dimensi input, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan pedoman pelaksanaan, persyaratan administrasi, mekanisme pendaftaran, serta pembagian tugas antarinstansi secara jelas. Akan tetapi, efektivitas program masih dibatasi oleh keterbatasan kuota penerima dan rendahnya kesiapan administrasi sebagian nelayan. Berdasarkan hasil wawancara, Kabupaten Tapanuli Tengah hanya memperoleh kuota sekitar 1.000 penerima setiap tahun sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh nelayan yang memenuhi syarat. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Penangkapan *"Kuota penerima bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga tidak semua nelayan yang memenuhi syarat dapat langsung memperoleh bantuan. Kami harus melakukan seleksi berdasarkan data yang tersedia."* (Kepala Bidang Penangkapan, Wawancara, 2024).

Selain itu, seorang pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan menjelaskan *"Sebagian besar kendala berasal dari dokumen administrasi. Banyak nelayan belum memiliki Kartu Kusuka atau belum melengkapi persyaratan sehingga pengusulan peserta menjadi tertunda."* (Pegawai DKP, Wawancara, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun desain program telah memadai, kecukupan sumber daya dan kesiapan administrasi masyarakat masih menjadi tantangan implementasi. Hal ini sesuai dengan konsep evaluasi input menurut ²³ yang menekankan pentingnya kesiapan sumber daya, strategi, dan dukungan organisasi dalam menentukan keberhasilan program.

Pada dimensi process, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh prosedur pelaksanaan BPAN telah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, mulai dari pengajuan berkas, verifikasi administrasi, penerbitan Surat Keputusan Nelayan Penerima BPAN, penerbitan polis asuransi, hingga mekanisme pengajuan klaim. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan berupa kompleksitas prosedur administrasi dan lamanya proses penerbitan kartu asuransi. Salah seorang nelayan menyampaikan *"Sebenarnya kami tidak keberatan mengurus persyaratan, tetapi prosesnya cukup panjang karena harus bolak-balik melengkapi dokumen. Kadang kami harus meninggalkan pekerjaan melaut untuk mengurus administrasi."* (Nelayan, Wawancara, 2024).

Ketua HNSI Kabupaten Tapanuli Tengah juga mengungkapkan *"Sebagian anggota kelompok menganggap proses administrasi cukup rumit sehingga mereka memilih menunda pengurusan. Padahal manfaat program ini sangat besar apabila mereka menjadi peserta."* (Ketua HNSI, Wawancara, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi bukan terletak pada substansi program, melainkan pada aspek birokrasi dan pelayanan administrasi. Hal ini mendukung teori ²⁴ bahwa struktur birokrasi dan koordinasi antarorganisasi berpengaruh langsung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pada dimensi product, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPAN telah memberikan manfaat nyata berupa perlindungan finansial bagi nelayan dan keluarganya ketika terjadi kecelakaan kerja maupun kematian. Program ini meningkatkan rasa aman nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan serta mengurangi beban ekonomi keluarga ketika menghadapi risiko kerja. Seorang nelayan penerima manfaat menjelaskan *"Setelah menjadi peserta BPAN saya merasa lebih tenang saat melaut karena kalau terjadi sesuatu keluarga masih memiliki perlindungan. Program ini sangat membantu kami yang pekerjaannya"*

²³ Stufflebeam, "The CIPP Model for Program Evaluation BT - Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation."

²⁴ Amma, Bagus, and Suprojo, "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sidomulyo Kota Batu Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn."

penuh risiko." (Nelayan Penerima BPAN, Wawancara, 2024).

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa sebagian besar peserta tidak melanjutkan kepesertaan secara mandiri setelah masa subsidi pemerintah berakhir. Menurut Kepala Bidang Penangkapan *"Tantangan terbesar justru setelah masa bantuan selesai. Sebagian besar nelayan belum bersedia membayar premi sendiri karena pendapatan mereka tidak menentu."* (Kepala Bidang Penangkapan, Wawancara, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat BPAN masih lebih dominan pada aspek perlindungan jangka pendek. Dalam perspektif evaluasi product,²⁵ menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari hasil langsung, tetapi juga dari keberlanjutan dampak yang dihasilkan. Oleh karena itu, keberlanjutan kepesertaan menjadi indikator penting yang masih perlu ditingkatkan. Temuan ini juga konsisten dengan²⁶ yang menyatakan bahwa program perlindungan sosial nelayan akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan literasi keuangan sehingga peserta mampu mempertahankan kepesertaan secara mandiri.

Secara keseluruhan, evaluasi berdasarkan model CIPP menunjukkan bahwa Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah telah memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat nelayan, didukung oleh mekanisme implementasi yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi penerima program. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sosialisasi, kuota penerima, kesiapan administrasi, dan rendahnya keberlanjutan kepesertaan setelah subsidi berakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi publik, memperluas pendampingan administrasi, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta mengembangkan skema pembiayaan berkelanjutan agar tujuan perlindungan sosial bagi nelayan dapat tercapai secara optimal dan berkesinambungan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program BPAN secara umum telah berjalan, tetapi belum mencapai tingkat optimal dalam memenuhi tujuan perlindungan sosial bagi nelayan. Pada aspek konteks, program telah memiliki landasan kebijakan yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Namun, implementasi di tingkat lokal masih menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas masyarakat sasaran. Rendahnya pemahaman nelayan terhadap program, minimnya keterlibatan nelayan dalam proses perencanaan, serta lemahnya strategi adaptasi terhadap kondisi eksternal menunjukkan bahwa perumusan konteks program belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal. Pada aspek input, dukungan sumber daya manusia, kelembagaan, dan mekanisme administrasi telah tersedia, tetapi masih menghadapi keterbatasan terutama dalam hal kuota peserta, ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah pusat, dan prosedur administrasi yang belum sederhana. Pada aspek proses, pelaksanaan teknis program telah mengikuti aturan yang berlaku, tetapi masih ditemukan kendala berupa keterlambatan penerbitan kartu peserta, lambatnya mekanisme klaim, serta kurang optimalnya kegiatan sosialisasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi antaraktor pelaksana program. Sementara itu, pada aspek produk, BPAN telah memberikan manfaat berupa peningkatan rasa aman dan perlindungan risiko bagi nelayan yang

²⁵ Stufflebeam, "The CIPP Model for Program Evaluation BT - Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation."

²⁶ Lymer, Simon Funge-Smith, and Miao, *Status and Potential of Fisheries and Aquaculture in Asia and the Pacific 2008*.

menjadi peserta, tetapi dampaknya belum dirasakan secara luas karena cakupan kepesertaan, tingkat klaim, dan keberlanjutan program masih rendah. Dengan demikian, Program BPAN di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dikategorikan sebagai program yang relevan dan bermanfaat, tetapi memerlukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan kapasitas pelaksana, penyederhanaan prosedur, serta strategi keberlanjutan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat nelayan.

Daftar Pustaka

- Amma, Gisela Mburu, Nanang Bagus, and Agung Suprojo. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sidomulyo Kota Batu Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn." *Lenvari: Journal of Social Science* 2, no. 1 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.61105/jss.v2i1.96>.
- Aprilia, Ryanty, Debora Selly Hutabarat, and Putri Cristin. "Transformasi Mata Pencarian Generasi Muda Dalam Komunitas Nelayan Di Bintang." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4, no. 02 SE-Artikel (June 2, 2026). <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i02.2268>.
- Aziz, Ahmad Abdul. "Strategi Peningkatan Kesadaran Dan Akses Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Nelayan Di Kabupaten Indramayu" 1 (2025): 19–28. <https://doi.org/10.31002/rosee.v1i2.2872>.
- Creswell, John W., and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. <https://collegepublishing.sagepub.com/products/qualitative-inquiry-and-research-design-4-246896>, 2020.
- Daniarsyah, Dida. "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu." *Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studies (Jipags)* 3, no. NO DATE (2019): 628–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v3i2.7552>.
- Dewi, Irlina, Titin Sumarni, and Indra Indra. "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan." *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 118–27. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.508>.
- Findra Riadi, Yacob Noho Nani, Raihan Hanasi. "Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha" 5, no. 1 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.54923/researchreview.v5i1.389>.
- Joko Pramono. S. Sos., M S. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=yruBEAAAQBAJ>.
- Lymer, David, Jesper Clausen Simon Funge-Smith, and Weimin Miao. *Status and Potential of Fisheries and Aquaculture in Asia and the Pacific 2008*. Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific, 2008. <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0433e/i0433e00.pdf>.
- Miles, M B, A M Huberman, and J Saldana. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>.
- Murty, Theta. "Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan." *Simbur Cahaya*, no. 18 (2020): 158–75. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1043>.
- Nur Aisyah, Muhammad Syukri Albani Nasution, and Ahmad Muhaisin B Syarbaini Tanjung. "Analisis Partisipasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya Di Kota Sibolga." *Jurnal Lentera Bisnis* 13, no. 3 (2024): 1686–98. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1213>.
- Patton, M Q. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. SAGE Publications, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=ovAkBQAAQBAJ>.
- Stufflebeam, Daniel L. "The CIPP Model for Program Evaluation BT - Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation." edited by George F Madaus, Michael S Scriven, and Daniel L Stufflebeam, 117–41. Dordrecht: Springer Netherlands, 1983. https://doi.org/10.1007/978-94-009-6669-7_7.
- Weyant, Emily. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th Edition." *Journal of Electronic Resources in Medical Libraries* 19, no. 1–2 (2022): 54–55. <https://doi.org/10.1080/15424065.2022.2046231>.